
**OPTIMALISASI ADIDAYA PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PENYULUHAN KRIPIK PELEPAH PISANG
(Studi Kasus Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi)**

**OPTIMIZING THE DEFENSE OF THE VILLAGE GOVERNMENT IN COMMUNITY
EMPOWERMENT AND COUNSELING ON BANANA LEAF CHIPS
(A Case Study In Pakel Village, Licin Sub-district, Banyuwangi District)**

Ahmad Badrus Sholihin

**Yulia Nur Astutik, Elda Rizky Febriantje, Dicky Rahmat Aprilianto,
Adelia Khumayroh, Silvi Ika Wijayanti, Saifulloh Farid Arif, Haris Mafadi,
Ubaidillah Mu'izzi Ulum, Ghovinda Dwi Anugerah, Kholishotul Maghfiroh,
Irmayatul Kinnanah, Lilik Ismaturohmah, Zakiatul Ainiyah,
Farel Almer Reyhan, Ahmad Kamiludin**

Institut Agama Islam Negeri Jember
Adhelieakhumaeyroh@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat salah satunya yakni dengan memperjuangkan kembali lahan yang dikuasai oleh pihak lain yang merugikan masyarakat setempat. Dukungan pemerintah sangat mempengaruhi perjuangan masyarakat dalam memenuhi hak-hak yang seharusnya dikelola sendiri oleh masyarakat, kebijakan dan keputusan yang diterapkan akan mempengaruhi hasil dari perjuangan yang dilakukan tersebut. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik. Data diambil melalui proses wawancara, studi pustaka, dokumentasi dan observasi. Perjuangan masyarakat yang tidak kunjung usai membuat perekonomian masyarakat menjadi terganggu, lahan yang awalnya dikelola oleh masyarakat sekarang dikuasai oleh pihak lain. Masyarakat yang bekerja di perkebunan tersebut diberhentikan karena ikut dalam perjuangan kepemilikan lahan. Untuk membantu perekonomian masyarakat khususnya di bidang kewirausahaan penulis mengadakan penyuluhan kripik pelepah pisang dalam menciptakan usaha mandiri masyarakat. Penulis berinisiatif untuk meracik pelepah pisang yang tidak dimanfaatkan masyarakat menjadi kripik yang enak untuk dikonsumsi. Penyuluhan ini bertujuan untuk membantu masyarakat berinovasi menciptakan produksi baru yang dapat menarik konsumen dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

Kata Kunci : *Optimalisasi, Adidaya, Penyuluhan.*

ABSTRACT

This study aims to describe the role of the government in community empowerment, one of which is by fighting for land controlled by other parties which is detrimental to the local community. Government support greatly influences the struggle of the community in fulfilling the rights that should be managed by the community themselves, the policies and decisions that are implemented will affect the results of the struggle carried out. This research method is a type of qualitative research. The type of research used in this research is descriptive analytic research. The data were collected through the process of interviews, literature study, documentation and observation. The people's struggle that never ends has disturbed the community's economy, the land that was

originally managed by the community is now controlled by other parties. The people working on the plantations were dismissed for taking part in the struggle for land ownership. To help the community's economy, especially in the field of entrepreneurship, the writer held counseling on banana leaf chips in creating community independent businesses. The author took the initiative to recycle banana leaf that are not used by the public into delicious chips for consumption. This counseling aims to help people innovate to create new products that can attract consumers and have high economic value.

Keywords : *Optimizing, The defense, Counseling*

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat (khususnya yang kurang memiliki akses terhadap pembangunan) didorong untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan peri kehidupan mereka. Model-model pemberdayaan: People Centre Development (i.e.IDT, Proyek Kawasan Terpadu (PKT), Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), Jaringan Pengaman Sosial (JPS), Raskin, BLT); Model Lingkaran Setan Kemiskinan; Model Kemitraan, dll.¹

Diberlakukannya Undang-undang Otonomi daerah merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam mengoptimalkan peran daerah dalam pembangunan nasional. Pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembang-kan peran pemerintahannya dalam mengexplore potensi yang dimiliki serta memberdayakan masyarakat guna kesejahteraan bersama. Dimana apabila kesejahteraan masyarakat meningkat maka akan menaikkan taraf kehidupan masyarakat didaerah tersebut. Sehingga akan memajukan standar kehidupan didaerah tersebut.

Desa Pakel merupakan desa yang sangat indah dikelilingi pemandangan-pemandangan yang cukup menawan mata, dengan letak geografis yang berada didataran tinggi membuat desa ini masih cukup asri dengan banyak hutan yang mengelilinginya. Masyarakat desa ini mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan peternak sapi. Luas Desa Pakel dipeta yakni kurang lebih 3000 hektar tanah tetapi yang dikelola masyarakat hanya sekitar 307 hektar saja. Karena pada awalnya penduduk desa ini sedikit, jadi hanya sedikit saja yang mampu dikelola masyarakat. Selebihnya dikuasai oleh pihak lain yang sejatinya itu masih murni milik masyarakat Desa Pakel bukan milik perseorangan atau yang lainnya.

Permasalahannya terletak pada bagaimana optimalisasi peran pemerintah dalam memperjuangkan hak masyarakat. Karena hal ini merupakan kewajiban pemerintah untuk membantu dan mem-bimbing masyarakat mendapatkan hak-haknya. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Optimalisasi peran

¹ Agus Surjono & Trilaksono Nugroho, *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 123.

pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa Pakel kecamatan Icin kabupaten Banyuwangi". Dengan tujuan men-deskripsikan upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam merebut kembali hak masyarakat yang seharusnya manfaat-nya dirasakan oleh masyarakat bukan oleh pihak perseorangan atau yang lainnya.

METODE

Penelitian ini akan meneliti peranan pemerintah desa pakel dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat guna merebut kembali hak-hak masyarakat yang dikuasai oleh perseorangan, dan penyuluhan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan dan pemahaman masyarakat. Menurut Suharto yang dikutip oleh Oos M. Anwas, penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu : pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan.²

Adapun penjelasan dari 5P diatas dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Pemungkinan; menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat cultural dan struktur menghambat.
2. Penguatan; memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. Perlindungan; melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokongan; memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan; memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik. Data diambil melalui proses

² Oos M. Anwas, *Pemberdayan Masyarakat Di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 87.

wawancara, studi pustaka, dokumentasi dan observasi di Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi. Untuk menyelesaikan masalah yang sudah dipaparkan diatas kami melakukan penyuluhan untuk menambah wawasan dan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perjuangan Masyarakat⁴

| NO | TAHUN | NAMA KEGIATAN |
|-----------|------------------------|---|
| 1. | 1925 | Pengajuan Kepada Pemerintah Pusat Untuk Sertifikasi Kepemilikan Hak Tanah Yang Sah. |
| 2. | 1929 | Surat Sertifikasi Diterima Tetapi hilang ditengah jalan tidak ditunjukkan pada masyarakat. |
| 3. | 1993 | Masyarakat Memperjuangkan Kembali Haknya. |
| 4. | 1998 | Masyarakat Memasuki Lahan. |
| 5. | 1999 | Adanya penyusup yang menebang lahan milik pihak lain secara sembarangan. |
| 6. | 2011 | Surat Sertifikasi ditemukan. |
| 7. | 2012 | Membentuk Team 10 tapi vakum tidak berjalan. |
| 8. | 2017 | Mulai bangkit dan memperjuangkan kembali dengan team 10. |
| 9. | 2018 – Sekarang | Masih tetap berjuang mempertahankan kepemilikan. |

Pada awalnya ada tiga orang yang mewakili untuk pengajuan sertifikasi hak milik tanah secara resmi ke pemerintah pusat di kala itu masih zaman Belanda. Setelah hal itu dilakukan respon pemerintah pusat menerima pengajuan tersebut, yang menyatakan bahwa lahan tersebut murni hak masyarakat desa pakel dan masyarakat berhak mengelolanya. Namun surat tersebut tidak ditunjukkan kepada masyarakat desa Pakel, hanya berada dikawasan pemerintah desa sendiri. Ketika itu masyarakat mulai memasuki lahan hutan lindung melakukan pematangan kayu untuk dapat dikelola. Tetapi masyarakat yang melakukan penebangan ditahan karena tidak memiliki izin, yang sejatinya izinnya sudah ada tetapi tidak diberikan atau ditunjukkan kepada masyarakat.

Di tahun 1993 masyarakat memperjuangkan kembali haknya tetapi gagal, pada tahun

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung : ALFABETA, 2009),

⁴ Mulyadi, *Wawancara*, 14 Februari 2021.

1998 masyarakat mulai memasuki lahan yang dikuasai pihak lain, dan ditanami dengan pohon durian. Pada tahun 1999, ada orang yang memasuki hutan lindung dan menebang pohon disana, masyarakat mengira orang tersebut bagian dari orang yang ikut memperjuangkan kepemilikan lahan, tetapi ternyata mereka adalah penyusup yang melakukan penebangan demi kepentingannya sendiri, akhirnya pihak tersebut ditahan. Kemudian masyarakat merasa dirugikan dan melakukan perlawanan, hingga akhirnya memasuki lahan hutan lindung, banyak masyarakat yang ditahan karena hal tersebut. Oleh karena itu banyak masyarakat melarikan diri ke kota-kota lain untuk menyelamatkan diri, sehingga di desa Pakel hanya tersisa kaum wanita saja. Saat kericuhan itu terjadi masih tidak ada respon dan dukungan dari kepala desa yang menjabat di masa itu. Sehingga lahan yang awalnya dikuasai masyarakat diambil alih oleh pihak lain dan dijadikan hutan sosial.

Setelah dijadikan hutan sosial didalam aturannya jarak tanam yakni 8x6 meter sehingga masyarakat masih mendapat sedikit bagian untuk dikelola. Seiring berjalannya waktu sekitar 2 tahun berikutnya aturan tersebut dirubah, jarak tanam yang awalnya 8x6 meter diubah menjadi 2 meter sehingga masyarakat tidak kebagian lahan didaerah tersebut. Tahun 2011 surat bukti kepemilikan tanah yang waktu itu sempat hilang akhirnya ditemukan dan dialih bahasakan menjadi Bahasa Indonesia. Pada tahun 2012 masyarakat mulai bangkit kembali memperjuangkan haknya tetapi tidak didukung kembali oleh pemerintah daerah setempat. Tetapi pada akhir masa jabatannya karena kepentingan politik kepala desa tersebut mendukung dan membentuk Tim 10.⁵

Kemudian setelah pergantian Kepala desa, masyarakat bersama dengan pihak desa melanjutkan perjuangan dengan Team 10 tersebut tetapi gagal, akhirnya masyarakat menyerah dan tidak melanjutkan perjuangan. Tahun 2017 masyarakat mulai bangkit kembali sampai tahun 2018 dan mengajukan ke pihak pertanahan, bupati, tetapi tidak dapat bertemu langsung secara tatap muka. Kemudian pemerintah bersama masyarakat mengirimkan surat kepada BPN untuk menanyakan mengenai HGO tanah, dan mereka menyatakan bahwa desa pakel tidak termasuk HGO pihak tersebut. Setelah itu pemerintah dan masyarakat melanjutkan perjuangan ke pemerintah pusat sampai mengirimkan surat ke presiden dan wakil-wakil rakyat lainnya yang dirasa mampu membantu tetapi tidak berhasil, perjuangan rakyat pun terus berlanjut sampai sekarang.

Dari permasalahan yang terjadi secara berkepanjangan di desa Pakel membuat perekonomian masyarakat terganggu. Maka dari itu Program KKN Posko 14 berinisiatif untuk mengadakan sosialisasi tentang penyuluhan kripik pelepah pisang dalam membangun usaha mandiri masyarakat. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk dapat merecycle kembali pelepah yang awalnya ketika panen pisang berlangsung pelepahnya tidak dimanfaatkan langsung dibuang begitu saja. Selain itu

⁵ Ibid

program KKN juga menjelaskan manfaat-manfaat yang terkandung dalam pelepah pisang yang sebelumnya tidak diketahui oleh masyarakat manfaat pelepah pisang yaitu sebagai berikut :



Selain itu gedebong pisang juga dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mengembangkan usahanya atau masyarakat yang ingin membuka usaha baru. Pelepah pisang juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga dapat sedikit membantu bagi masyarakat di desa Pakel. Antusiasme warga dalam mengikuti penyuluhan ini membuat kami yakin bahwa masyarakat desa Pakel mampu mengembangkan potensi dan memulihkan kembali perekonomian di desa tersebut. Berikut lampiran sosialisasi penyuluhan kripik pelepah pisang.





SIMPULAN

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah setempat untuk merebut kembali hak yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat maupun desa itu sendiri. Perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat saat ini tidak akan berhasil jika tanpa dukungan oleh pemerintah daerah seperti yang dikemukakan oleh Suharto yang dikutip oleh Oos. M Anwas, penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu; pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan.

Pemerintah Desa Pakel telah berusaha secara maksimal untuk memperjuangkan hak masyarakat namun usaha yang dilakukan tidak membuahkan hasil. Laporan yang diajukan tidak diindahkan oleh Pemerintah pusat. Sehingga konflik hingga saat ini masih belum kunjung usai, perekonomian masyarakat pun menjadi terganggu. Masyarakat yang awalnya bekerja di perkebunan yang diakui milik pihak lain tersebut kini diberhentikan karena ikut melakukan perjuangan, banyak masyarakat yang pendapatannya berkurang karena hal tersebut.

Sosialisasi yang dilakukan program KKN posko 14 bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat Desa Pakel agar masyarakat dapat mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) atau produksi rumahan supaya dapat berkembang dan menciptakan produk baru serta membuka lapangan pekerjaan yang baru di era pandemi

Ahmad Badrus Sholihin, dkk

Optimalisasi Adidaya Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat ...

seperti saat ini. Untuk usaha masyarakat yang lagi sepi, penyuluhan ini dilakukan untuk menginovasi masyarakat dalam memanfaatkan atau meracyle kembali pelepah pisang yang tidak dimanfaatkan menjadi barang yang bermanfaat dan dapat dikonsumsi serta memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Anwas, Oos. M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung : Alfabeta

Mulyadi. 14 Februari 2021. Wawancara.

Nugroho, Trilaksono dan Agus Surjono. 2008. *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang : Banyumedia Publishing.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:ALFABETA

Tim Penyusun. 2018. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Press.